

**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN DAWE**

Alamat : Jl. Kudus – Colo No. 292 A Piji Dawe

Telp.(0291)433194

DAWE 59353

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1- 9
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	9-10
1.3 Maksud dan Tujuan	10-11
1.4 Sistematika Penulisan	11-12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAWE TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13-24
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25-30
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dawe	31-33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	33-46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	47-55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Kebijakan Terhadap Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dawe	56-59
3.2 Rencana Program dan Kegiatan	60-63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan	64-65
4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebarabn lokasi program dan kegiatan dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya	65-73
BAB V PENUTUP	74-75

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Pemerintah Kecamatan Dawe dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dawe Tahun 2024. Rencana Kerja ini disusun sebagai implementasi Rencana Strategis Kecamatan Dawe Tahun 2024 – 2026 pada Tahun Anggaran 2024.

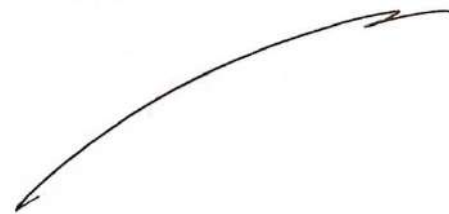
Rencana Kerja Kecamatan Dawe ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas-tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Dawe.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Dawe Tahun 2024 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Dawe, 2023

CAMAT DAWE



FAMNY DWI ARFANA, S.STP

Pembina

NIP. 19870409 200602 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus untuk

periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Kudus dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

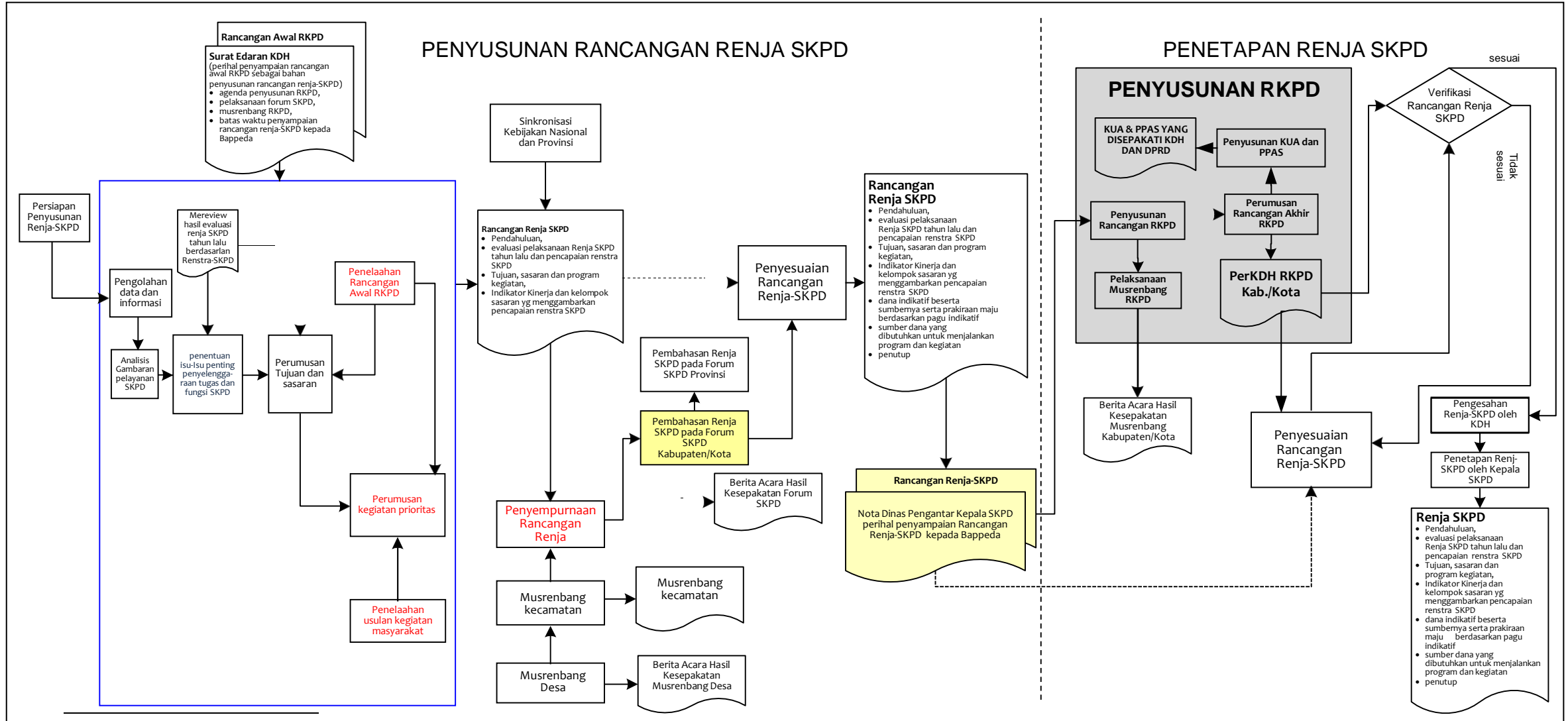
Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Tabel. 1.1

Bagan Alur Proses Tahapan Penyusunan Renja SKPD

1



1

Rencana Kerja Kecamatan Dawe tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah :

“KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mengandung isian yang dapat diuraikan sebagai berikut : “Kabupaten Kudus Menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya. Yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, Untuk memujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Renja Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Dawe, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Dawe, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Dawe;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Dawe;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dawe tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Dawe;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Dawe;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Dawe;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Kudus tahun 2024;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Dawe; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Dawe.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Dawe;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Dawe adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Dawe.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Dawe untuk kondisi tahun 2024 - 2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Dawe.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dawe tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Dawe mencakup ;

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Dawe. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Dawe dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Dawe tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Dawe;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Dawe dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Dawe sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dawe tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Dawe.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Dawe dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Dawe;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Dawe;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Dawe.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Dawe.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Dawe. Namun dalam proses ini Kecamatan Dawe mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dawe terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen renja Kecamatan Dawe;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Dawe merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Renja Kecamatan Dawe;

Penyempurnaan Renja Kecamatan Dawe perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan Tim Anggaran Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan renja Kecamatan Dawe dengan saran dan masukan dari tim desk renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen Renja Kecamatan Dawe dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Kecamatan Dawe yang telah didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4700) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evlusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nonemklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Dawe untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawe.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Dawe selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Dawe Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Dawe Tahun 2024;
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawe Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Dawe Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAWE TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DAWE

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan
- 4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana
- 4.3 Tabel rencana program, kegiatan dan subkegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN DAWE TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dawe Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Dawe Tahun 2024-2026

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Dawe tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Dawe dalam melaksanakan program, kegiatannya dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Dawe dengan penyerapan anggaran Kecamatan Dawe yang ditargetkan 100% sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 93,54 % atau sebesar (Empat milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh deapan ribu dua ratus tiga puluh satu).

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Dawe tahun 2021 seperti digambarkan pada table 2.1, meliputi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 (RKPD n-2) dan Target Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 (RKPD n-1) yang dituangkan dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Dawe Tahun Lalu sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan dan sub kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ keluaran yang direncanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan mebel

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- Sub.Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan rincian kegiatan/sub kegiatan :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rincian Kegiatan dan sub kegiatan adalah :

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan rincian Kegiatan dan sub kegiatan adalah :

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

c. Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Dawe tidak ditemukan karena dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya.

d. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan Penyerapan anggaran 0%.

- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/Kota dengan penyerapan anggaran 0%.

- Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek, Pemajuan Tradisi budaya penyerapan anggaran 0%.
- Tidak tercapainya target kinerja di karenakan menyesuaikan kegiatan Tingkat Kabupaten

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

1. Implikasi
yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dawe tahun 2024-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Dawe pada umumnya.
2. Terhadap
program/kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dawe selain berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Dawe , menyebabkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan maksimal.

f. Kebijakan yang diambil untuk mempertahankan kondisi keberhasilan perencanaan adalah sebagai berikut :

1. STRATEGI

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepada masyarakat
3. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan aparatur desa.
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.

2. KEBIJAKAN

1. Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan
2. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk

peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.

Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah (download dari eplaning laporan evaluasi hasil renja PERNGKAT DAERAH) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.023.392		557.527		962.232		1.198.730		1.051.177		3.769.665		93,69	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Dawe)	86 Indeks		80,84		80,42		91,3		85,04		85,04		98,88		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.276		269		1.088		1.509		265		3.131		43,03	
		Jumlah Data / Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan	8 dokumen		2,00		2,00		2,00		2,00		8		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.246		237		300		759		0		1.296		39,92	
		Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja aparatur	8 dokumen		2		4,00		0		2,00		8		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.030		32		788		750		265		1.835		45,53	
		Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen		0		4,00		2,00		0		6		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.399.476		466.745		839.772		1.078.924		814.754		3.200.194		94,14	
		Jumlah Data/ Dokumen administrasi dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	90 %		22,50		19,50		38,00		20,00		100		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.396.476		466.638		839.182		1.078.555		814.754		3.199.128		94,19	
		Jumlah Gaji dan tunjangan ASN	29 orang		29		0,00		0		0		29		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.000		107		590		369		0		1.066		35,52	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)	Ket			
				I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun (RKA, DPA, DPPA dan Laporan Keuangan)	4 dokumen		2		1,00		0		1,00		4		100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun sesuai standart	4 dokumen		2		1,00		0		1,00		4		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			48.670		7.243		12.671		13.386		11.885		45.185		92,84	
		Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	90 %		20,00		29,00		31,00		20,00		100		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.002		670		2.803		1.521		1.715		6.709		95,82	
		Jumlah Alat Listrik dan elektronik	5 jenis		1		2,00		1,00		1,00		5		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.983		2.342		2.556		2.499		2.411		9.808		98,25	
		Jumlah Barag Habis Pakai Penunjang Administrasi Kantor	32 jenis		12		15,00		2,00		3,00		32		100		
		Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6 Jeenis		2		1,00		0		3,00		6		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.750		2.003		1.782		5.082		1.883		10.750		100	
		Belanja Alat Rumah Tanggal	22 Jenis		7		10,00		3,00		2,00		22		100		
		Belanja Karangan Bunga	1 jenis		0		0,00		1,00		0		1		100		
		Belanja Pengisian Tabung Gas	1 Jenis		1		0,00		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.002		1.058		2.665		1.549		2.486		7.758		96,95	
		Belanja Makanan dan Minumam	5 jenis		4		1,00		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.284		0		800		0		400		1.200		52,55	
		Jumlah Barang cetak dan penggandaan	3 jenis		1		1,00		1,00		0		3		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600		550		825		825		1.375		3.575		99,31	
		Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	3 jenis		2		0,00		0		1,00		3		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			7.050		620		1.240		1.910		1.615		5.385		76,38	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)	Ket			
				I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Konsultasi SKPD																
		Junlah Belanja perjalanan dinas yang tercukupi	260 hari		12		3,00		5,00		240,00		260		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			264.291		50.197		64.224		59.712		74.942		249.075		94,24	
		Jumlah Administrasi umum yang tersedia	90 %		20,00		28,00		32,00		20,00		100		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500		400		840		600		660		2.500		100	
		Jumlah Belanja surat menyurat	1 jenis		1		0,00		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			54.310		6.400		9.399		13.293		10.849		39.941		73,54	
		Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 jenis		3		0,00		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			207.481		43.397		53.985		45.819		63.433		206.634		99,59	
		Honorarium non PNS (PHD)	1 orang		1		0,00		0		0		1		100		
		Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Kebersihan	2 orang		2		0,00		0		0		2		100		
		Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Administrasi	2 orang		2		0,00		0		0		2		100		
		Jumlah Premi asuransi ang terbaar	4 dokumen		0		4,00		0		0		4		100		
		Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang)	8 orang		8		0,00		0		0		8		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			303.679		33.074		44.477		45.199		149.331		272.080		89,59	
		Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	90 %		0,00		48,00		32,00		20,00		100		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			147.415		9.915		19.584		28.532		76.466		134.497		91,24	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)	Ket			
				I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah BBM dan Olie	5504 liter		1376		1.426,00		1.401,00		1.301,00		5504		100		
		Jumlah Belanja Suku Cadang	16 unit		4		2,00		2,00		8,00		16		100		
		Jumlah Jasa Operasional Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas	16 unit		4		0,00		4,00		8,00		16		100		
		JUmlah Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas operasional	16 unit		4		0,00		4,00		8,00		16		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			143.408		23.159		23.533		15.892		68.469		131.053		91,39	
		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit		0		0,00		0		1,00		1		100		
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan (Tenaga Keamana)	2 orang		2		0,00		0		0		2		100		
		Jumlah Premi Asuransi yang terbayar (Tenaga Keamanan)	2 orang		2		0,00		0		0		2		100		
		Jumlah sewa tanah /tempat/gedungkantor yang terbayar	12 bulan		0		0,00		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.856		0		1.360		775		4.395		6.530		50,79	
		Jumlah Jasa Servis Peralatan Gedung kantor ang terpelihara	4 unit		1		1,00		0		2,00		4		100		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.440		0		0		0		0		0		0	
		cakupan pengembangan kebudayaan (dawe)	100 %		0		15		25		50		50		50		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.440		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %		7,00		8,00		10,00		25,00		50		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
				I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100	11						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			1.440		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Festival seni dan budaya yang terlaksana	1 kali		0	0,00		0		0		0		0		0
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			3.885		750		0		1.685		0		2.435		62,68
		cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (dawe))	100 %		20	25		70		50		50		50		50
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>			3.885		750		0		1.685		0		2.435		62,68
		Jumlah Peserta MTQ yang mengikuti tingkat Kecamatan	1 kegiatan		0,00	0,00		0		0		0		0		0
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			3.885		750		0		1.685		0		2.435		62,68
		Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	1 kali		0	0,00		0		0		0		0		0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.922		375		386		1.909		2.450		5.120		86,45
		cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Dawe)	100 %		25	40		65		100		100		100		100
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>			5.922		375		386		1.909		2.450		5.120		86,45
		Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 kali		1,00	0,00		0		1,00		2		100		100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.922		375		386		1.909		2.450		5.120		86,45
		Jumlah Jasa Jumlah Pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi kependudukan	2 kali		0	1,00		0		1,00		2		100		100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN			122.037		375		1.013		1.325		107.846		110.559		90,59

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)	Ket			
				I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (dawe)	100 %		15		42		80		100		100		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			122.037		375		1.013		1.325		107.846		110.559		90,59	
		Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	1 kali		1,00		0,00		0		0		1		100		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			8.132		0		1.013		0		1.081		2.094		25,74	
		Jumlah Pameran Pembangunan yang dilaksanakan	1 kali		0		0,00		0		1,00		1		100		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			113.905		375		0		1.325		106.765		108.465		95,22	
		Jumlah Desa yang mengikuti lomba	1 Desa		1		0,00		0		0		1		100		
		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang melaksanakan pembinaan	1 organisasi		1		0,00		0		0		1		100		
		Jumlah Organisasi Perempuan yang melaksanakan pembinaan	1 organisasi		1		0,00		0		0		1		100		
		Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Sosial	1 kali		1		0,00		0		0		1		100		
		Jumlah Pelaksanaan Monev dan pelaporan dana desa	18 Desa		18		0,00		0		0		18		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			8.000		1.152		1.548		0		2.160		4.860		60,75	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (dawe)	100 %		25		49		80		100		100		100		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.000		1.152		1.448		0		2.160		4.760		68	
		Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman	1 posko		1,00		0,00		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)	Ket			
				I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>dan ketertiban umum yang terlaksana</i>															
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			7.000		1.152		1.448		0		2.160		4.760		68	
		Jumlah posko yang terpantau dan piket bencana alam	1 posko		1		0,00		0		0		1		100		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.000		0		100		0		0		100		10	
		<i>jumlah penanganan kasus pelanggaran perda</i>	12 kasus		0,00		0,00		0		12,00		12		100		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			1.000		0		100		0		0		100		10	
		Jumlah Penanganan Kasus pelanggaran perda tramtibum dan kriminalitas	12 kasus		0		0,00		0		12,00		12		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			441.452		3.300		7.122		21.828		385.206		417.456		94,56	
		<i>cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (dawe)</i>	100 %		25		48		80		100		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			441.452		3.300		7.122		21.828		385.206		417.456		94,56	
		<i>jumlah penelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</i>	45 orang		0,00		0,00		45,00		0		45		100		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan			8.000		0		0		6.726		0		6.726		84,08	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)	Ket			
				I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
		Jumlah Peserta pembinaan Wawasan Kebangsaan	45 orang		0	0,00	45,00		0		45		100				
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			433.452		3.300	7.122		15.102		385.206		410.730			94,76	
		Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 bulan		3	1,00	1,00		7,00		12		100				
		Honorarium Linmas	12 bulan		0	4,00	-4,00		12,00		12		100				
		Honorarium Piket Kantor	12 bulan		3	2,00	1,00		6,00		12		100				
		Jumlah Kasus Konflik Sosial yang tertangani	12 kasus		0	2,00	0		10,00		12		100				
		Rakor Linmas	12 kali		0	0,00	0		12,00		12		100				
		Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 kali		0	0,00	0		12,00		12		100				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			124.815		5.866	1.040		8.715		99.433		115.054			92,18	
		cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (dawe)	100 %		25	85	80		100		100		100			100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			124.815		5.866	1.040		8.715		99.433		115.054			92,18	
		Jumlah Rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana	18 Desa		18,00	0,00	0		0		18		100				
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			9.892		0	0		5.675		150		5.825			58,88	
		Evaluasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	18 desa		18	0,00	0		0		18		100				
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			109.953		2.186	1.040		3.040		99.283		105.549			95,99	
		Monev dan pelaporan bidang	18 desa		18	0,00	0		0		18		100				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)	Ket		
				I		II		III		IV					9=5+6+7+8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		pemerintahan Desa														
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			4.970		3.680		0		0		0		3.680		74,05
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali		1		0,00		0		0		1		100	
JUMLAH				4.730.943		4.425.148							4.425.148			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)												90,02	93,54			
Predikat Kinerja												Tinggi	Sangat Tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mengkoordinasikan pada masing masing Seksi dan Subbag untuk melaksanakan kegiatan sesuai RAK yang telah direncanakan mulai awal tahun anggaran sampai akhir tahun anggaran																
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya penambahan perubahan di akhir tahun sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pertimbangkn dgn matang penentuan target kinerja di th mendatang agar tercapai maksimal																

2.2 Analisis kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian target kinerja Pelayanan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK. Namun karena dalam pelaksanaan Kecamatan Dawe mengacu pada indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kudus.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Dawe sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Dawe memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Dawe seperti digambarkan pada table 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawe
Kabupaten Kudus

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Persentase capaian kinerja subgiat	-	-	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	
2	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	-	-	>90%	>91,5%	>92%	N/A	N/A	N/A	
3	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	
4	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	
5	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	
6	Persentase BMD dalam kondisi baik	-	-	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	

7	Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	
8	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	-	-	5 Kegiatan	5 kegiatan	5 Kegiatan	N/A	N/A	N/A	
9	Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	-	-	70%	72%	75%	N/A	N/A	N/A	
10	persentase tindak lanjut hasil forkopimcam	-	-	55%	60%	65%	N/A	N/A	N/A	
11	Persentase penerapan standart pelayanan di Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	
12	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	-	-	12 Dok	12 Dok	12 Dok	N/A	N/A	N/A	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus (ngambil dari KK2)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Isu-isu terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Kecamatan Dawe sebagai penunjang pelaksanaan Bupati Kudus yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai tupoksi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas SDM yang belum memadai terutama di bidang pengelolaan IT;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat karena minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat OPD, padahal OPD adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada kepuasan masyarakat;
- c. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran teruta
- d. Belum maksimalnya koordinasi antara OPD Teknis yang mempunyai program / kegiatan dengan Kecamatan dan Desa sebagai pengampu wilayah.
- e. Masalah kondisi geografis yang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Dawe secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Seksi Pelayanan Umum

- 1) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e KTP;

- 2) Masih banyaknya masyarakat yang belum melek teknologi;
- 3) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.
- 4) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akte kematian, sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mengurus surat keterangan waris.
- 5) Masih tingginya warga yang belum memahami syarat-syarat untuk pengajuan legalisasi surat-surat.

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Belum maksimalnya koordinasi perangkat desa dengan Pemerintah Kecamatan;
- 2) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa;
- 3) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan desa yang kurang tertata;

c. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat (DTKS) yang mana merupakan dasar untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- 2) Masih banyak keluarga penerima bansos yang tidak sesuai peruntukannya.
- 3) Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah serta menumbuhkan kecintaan terhadap Al Quran bagi generasi muda.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kebudayaan atau kearifan lokal.

c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- 1) Masih kurang pemahannya tentang mekanisme dan administrasi pengejukan proposal;
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup;
- 3) Kurang maksimalnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah;
- 4) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:
 - a. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) sesuai keperuntukannya;
 - b. Mekanisme dan kelengkapan administrasi di semua kegiatan Pemerintahan Desa yang masih belum sesuai ketentuan;
 - c. Belum optimalnya pembinaan kegiatan di lembaga kemasyarakatan;

- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk memprossikan potensi dan peluang investasi di Kecamatan Dawe.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- 1) Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Dawe dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
- 2) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 3) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4. Review terhadap Renja Perangkat Daerah

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dawe serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Dawe diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan

secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Dalam rancangan awal Renja Kecamatan Dawe sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD maka direncanakan 6 Program dan 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Rencana anggaran sebesar Rp. 5.438.427.418,- (Lima milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah) Dari usulan kegiatan tersebut semua berasal dari APBD Kabupaten Kudus.

Rancangan awal dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan usulan kegiatan setelah dilaksanakan review terdapat kenaikan pagu indikatif sehingga menjadi Rp. 5.488.269.418,- (Lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar sebesar Rp.49.842.000,-

Sebagai gambaran perencanaan awal yang tertuang dalam RPJM, seiring dengan dinamika kebutuhan dan mengakomodir kebijakan pemerintah maka Kecamatan Dawe melakukan review atas rancangan awal RKPD yang tertuang dalam tabel 2.4. (TC-31)

Dalam tahapan penyusunan rumusan usulan program dan kegiatan serta indikator kinerja melalui beberapa pertimbangan untuk menentukan kebutuhan pendanaan tahun 2023. Sehingga dengan demikian pentingnya melakukan Review terhadap Rancangan Awal Renja 2020 untuk mengevaluasi kebutuhan dan realisasi anggaran sebagai acuan guna penyusunan rancangan renja tahun 2023 yang ditampilkan pada tabel 2.4 (Tc-31) dibawah ini :

Tabel 2.4 (Tc-31)
Telaah terhadap RKPD per program dan per kegiatan
Kabupaten Kudus

Ranwal RENJA TAHUN 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program / kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	46	nilai	4.669.810.067	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	47	nilai	4.719.652.067	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja subgiat	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	Persen	14.970.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja subgiat	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	Persen	14.970.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	>85	persen	3.585.756.350		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	>85	persen	3.585.756.350	

3	Administrasi Umum	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	Persen	136.373.300		Administrasi Umum	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	Persen	136.373.300	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	Persen	85.099.900		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	Persen	684.140.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	persen	213.312.517		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	persen	213.312.517	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	persen	634.298.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Semua Pegawai Kecamatan Dawe	100	persen	684.140.000	
B	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa tertib administrasi	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	100	Persen	405.245.712		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa tertib administrasi	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	100	Persen	405.245.712	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	18	desa	405.245.712		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	18	Desa	405.245.712	

C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	100	persen	254.367.398			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	100	persen	254.367.398		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	5	kegiatan	254.367.398			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	5	kegiatan	254.367.398		
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase dukungan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kebencanaan yang terealisasi	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	100	Persen	11.075.000			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase dukungan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kebencanaan yang terealisasi	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	100	Persen	11.075.000		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	60	%	11.075.000			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	60	%	11.075.000		
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	93	Persen	64.533.501			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	93	Persen	50.498.870		

1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase tindak lanjut hasil forkopimcam	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	70	persen	64.533.501			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase tindak lanjut hasil forkopimcam	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	55	persen	50.498.870		
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standard	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	80	persen	9.900.000			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standard	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	80	persen	9.900.000		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	80	persen	9.900.000			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kec. Dawe	60	persen	9.900.000		
Total						5.438.427.418			Total						5.488.269.418	

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Dawe. Namun dalam proses ini Kecamatan Dawe mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dawe terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Usulan program dan kegiatan dari Masyarakat/Desa ditujukan kepada Perangkat Daerah Teknis, sedangkan Kecamatan hanya sebagai penyelenggara/fasilitator pelaksanaan Musrenbang.

Sedangkan untuk usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan yang ditujukan kepada Kecamatan Dawe pada Tahun 2024 adalah nihil. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
	N	I	H	I	L

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2024, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Dawe sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dawe

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Dawe;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Dawe dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Dawe.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Dawe Kab. Kudus pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2024

VISI : KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELEGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal untuk Peningkatn Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	45	47
	Menguatnya Keberdayaan Masyarakat di pedesaan dan perkotaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Kewilayahan	Indeks Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	Persen	95	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif	Persen	75	80
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase dukungan SPM Bidang Ketentraman dan	Persen	100	100

					Ketertiban Umum dan kebencanaan yang terealisasi			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	Persen	77	79
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standar	Persen	86,5	87,5
					Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi	Persen	83	83

Kebijakan dan strategi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Dawe Tahun 2024 - 2026, Hal tersebut dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Dawe Tahun 2024 - 2026

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor -faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Dawe tahun 2023 ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan yaitu:

1. Visi dan Misi Bupati Kudus yaitu “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera”. Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kudus dilakukan antara lain :
 - a. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
 - b. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
 - d. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing;
2. Kebijakan nasional yang menjadi rujukan Kecamatan Dawe disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Dawe.

Dalam menentukan program dan kegiatan Kecamatan Dawe tahun 2024 faktor yang menjadi pertimbangan adalah bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pelaksanaan kebijakan nasional. Program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan nasional yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Tujuan dan sasaran Renstra

Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Dawe.

4. Peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024, Kecamatan Dawe mengacu pada Peraturan yang telah ditetapkan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja 2024 yaitu Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Dawe, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Dawe Tahun 2024 adalah sebanyak 6 Program dan 12 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 (6 Program) adalah sebagai berikut :

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan Tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 14 (empat belas) Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinth daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sedangkan Sub Kegiatan di Tahun 2024 ada 32 (Tiga puluh dua), diantaranya :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
21. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
22. Fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal diwilayah Kecamatan.

23. Koordinasi dengan Perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
24. Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan.
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
26. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah Kecamatan .
27. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
28. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
29. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
30. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemanfaatan Aset Desa
31. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
32. Fasilitasi Kerjasama antar dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

BAB IV. RENCANA DAN PENDANAAN KECAMATAN DAWE

4.1 Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

Rencana kerja Kecamatan Dawe Tahun 2024 dilaksanakan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan melakukan mapping/pemetaan antara Program, Kegiatan lama (Permendagri Nomor 13 Tahun 2016) dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan baru (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019).

Berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dawe Tahun 2024 -2026 dan mengacu hasil mapping / pemetaan terhadap Permendagri No 90 Tahun 2019, rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan Kecamatan Dawe pada Tahun Anggaran 2024.

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Kudus 2024 – 2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan

evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mencakup 6 (Enam) program, 14 (Empat belas) kegiatan dan 32 (Tiga puluh dua) sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 90 Tahun 2019 (No 050-3708 Tahun 2019).

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebab lokasi program dan kegiatan dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Dari hasil Mapping/ pemetaan Kecamatan Dawe yang akan melaksanakan 6 Program dan 14 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Rencana anggaran sebesar Rp. 4.716.347.680,- (empat milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Kudus Tahun anggaran 2024.

Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kudus sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif dapat dilihat dalam tabel 4.2

Tabel 4.2.

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DAWE KAB. KUDUS
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN DAWE						4.716.347.680,00							5.229.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.716.347.680,00							5.229.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						4.716.347.680,00							5.229.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	<i>Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)</i>	44 Nilai			43 Nilai	4.387.545.840,00						44 Nilai	4.604.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 person			-	17.049.860,00			-	-	Sumber Daya Aparatur	100 person	25.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	11 Dokumen			11 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DAHA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	11 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen			4 Laporan	6.049.860,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DAHA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	4 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 person			-	3.649.785.720,00			-	-	Sumber Daya Aparatur	100 person	3.547.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	24 Orang/Bulan			24 Orang/bulan	3.605.545.920,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DAHA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	24 Orang/Bulan	3.500.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen			6 Dokumen	42.240.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DAHA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	12 Dokumen	45.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	1.060.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DAHA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 person			-	112.257.760,00			-	-	Sumber Daya Aparatur	100 person	172.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			3 Paket	5.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DAHA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	1 Paket	5.500.000,00	KECAMATAN DAWE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			20 Paket	14.999.760,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	18.861.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	1 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			5 Paket	12.006.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	1 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			3 Paket	4.997.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur		5.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan			12 Laporan	1.242.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	12 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	50.952.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	12 Laporan	84.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah														
			-	100/persen			-	177.970.500,00			-	-	Sumber Daya Aparatur	100 persen	263.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan			12 Laporan	2.484.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	12 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			3 Laporan	59.985.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	12 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	115.501.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	12 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100/person			-	430.482.000,00			-	-	Sumber Daya Aparatur	100 person	596.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>	11 Unit			14 Unit	120.356.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	11 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	294.192.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur	1 Unit	511.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	15.934.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sumber Daya Aparatur		80.000.000,00	KECAMATAN DAWE
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan (melalui survey pelayanan di kecamatan)</i> <i>Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan (melalui survey pelayanan di kecamatan)</i> <i>Presentase kepuasan layanan masyarakat</i>	100 Persentase			100 persen 100 Persentase 100 presentase	82.695.900,00						100 Persentase	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penerapan standar Pelayanan di Kecamatan	100/persen			100 persen	11.078.900,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	100 persen	15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan			18 Laporan	11.078.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	11 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	71.617.000,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	-	15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dari/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>				12 Dokumen	71.617.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saling Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur		15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
3:	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	94 Persen			-	72.737.940,00						93 Persen	120.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	00 kegiatan			-	72.737.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saling Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	00 kegiatan	120.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	18.878.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saling Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN DAWE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan			12 Laporan	53.859.940,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	12 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN DAWE
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 <p>persen</p>			-	12.449.000,00						100 <p>persen</p>	15.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>undefined</i>	100 <p>Persen</p>			<i>undefined</i>	12.449.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	100 <p>Persen</p>	15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertera Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan			12 Laporan	12.449.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saling Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	2 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
5:	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100 perseb			-	74.035.000,00						100 perseb	100.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100/persen			-	74.035.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saling Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	100 persen	100.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Kelentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Kelentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	5 Laporan			12 Laporan	50.160.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saling Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	5 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN DAWE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	6 Dokumen			6 Dokumen	17.875.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugur, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Sumber Daya Aparatur	6 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN DAWE
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 <p>persen</p>			-	86.884.000,00						100 <p>persen</p>	360.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 <p>perse</p>			-	86.884.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugur, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Aparatur Pemerintah Desa	100 <p>perse</p>	360.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				4 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Aparatur Pemerintah Desa		15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				18 Dokumen	4.770.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Aparatur Pemerintah Desa		7.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	11 Dokumen			18 Dokumen	60.089.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Aparatur Pemerintah Desa	11 Dokumen	325.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	8.325.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Aparatur Pemerintah Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan Daya Saing Sum berdaya Manusia	Aparatur Pemerintah Desa	1 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN DAWE
J U M L A H									4.716.347.680,00						5.229.500.000,00	

BAB V PENUTUP

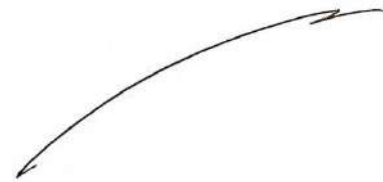
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dawe Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dawe Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kudus yaitu “KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS, DAN SEJAHTERA”. Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kudus dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dawe yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman bagi pemerintah Kecamatan Dawe di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Dawe berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dawe Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Dawe berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Dawe Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Dawe Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dawe selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Dawe. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Dawe Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Dawe ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Dawe serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus.

Kudus, 2023

CAMAT DAWE



FAMNY DWI ARFANA, S.STP

Pembina

NIP.19870409 200602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN DAWE

Jl. Kudus - Colo Nomor 292 A Piji Kudus Kode PosDaw 59353
Telp (0291) 433194
Email : kecamatanadawe13@gmail.com Website : dawe.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT DAWE KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 900/ /35.01/2023

**TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024**

CAMAT DAWE,

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Dawe Kabupaten Kudus

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
 10. . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2014 (Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, Nomor 107);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2029 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecaamatan;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024

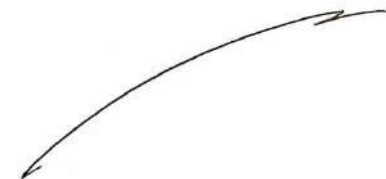
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Dawe untuk Periode 1 (satu) tahun yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

CAMAT DAWE,



FAMNY DWI ARFANA

Lampiran SK Camat Dawe
Nomor : 050.2.3/ /2023
Tentang : Tim Penyusun Rencana
Kerja Kecamatan Dawe
Tanggal : Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN DAWE TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Famny Dwi Arfana, S.STP	Camat	Ketua
2	Zainal Arifin, S.E	Sekretaris	Sekretaris
3	Karel Yudo Menggolo	Kassubbag PEP dan Keuangan	Ketua Kelompok Kerja
4	Siti Istiqomah, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Kelompok Kerja
5	Wayang Rizky P, S.STP	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota Kelompok Kerja
6	Zuliyati, S.E	Kasi. Ekonomi dan Pembangunan	Anggota Kelompok Kerja
7	Fitriana Sari, SE, M.M	Kasi Pelayanan Umum	Anggota Kelompok Kerja
8	Slamet Kasmudi, S.IP	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota Kelompok Kerja
9	Slamet, S.IP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota Kelompok Kerja
10	Sugiarto	Staf Subbag. PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja
11	Bushiri, S.IP	Staf Subbag. PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : Agustus 2023

CAMAT DAWE



FAMNY DWI ARFANA

